

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin, *et.al.*, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alatas, Syed Hussein, 1986, *Sosiologi Korupsi; Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- _____, 1987, *Korupsi; Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Anwar, Yesmil, *et.al.*, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, *et.al.*, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- _____, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Danil, H. Ewil, 2011, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur *et.al.*, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta.
- Effendi, Sofia, *et.al.*, 2012, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

- Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan dan Isu-isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta.
- Gunadi, Ismu, *et.al.*, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O. S, 2012, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia (Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan)*, Cet. 1, Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan khusus terhadap proses penyidikan, penuntutan, Peradilan serta upaya hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pardede, Rudi, 2017, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rukmana, Aan, 2009, *Korupsi di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Rosady, Ruslan, 2003, *Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Dasar-Dasar Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta
- _____, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, *et.al.*, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Edisi Revisi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sugono, Dendy, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi ke Empat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2002, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung.

Suteki, *et.al.*, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.

Sutopo, Ariesto Hadi, *et.al.*, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim MaPPI-FHUI, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-012/A/Cu.2/2013 tentang Pedoman Penyelesaian Piutang Negara Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Fatwa Mahkamah Agung pada tanggal 12 Januari 1988 Nomor : 37/TB/88/66/Pid, perihal : fatwa mengenai eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti

C. Tesis

Benget Hasudungan S., 2017, "Optimalisasi Eksekusi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti", *Tesis*, Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Muib, 2017, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Persidangan", *Tesis*, Magister Hukum Litigasi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

R. Harwiadi, 2017, "Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Tesis*, Magister Hukum Litigasi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

A. Djoko Sumaryanto, 2019, "Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", <http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/perspektif-yuridis-pengembalian.html>, diakses pada tanggal 18 Juni 2019.

Adi Condro Bawono, 2012, "Siapa saja yang berwenang memblokir Rekening Nasabah", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/u>

lasan/lt4f2123915732a/siapa-saja-yang-berwenang-memblokir-rekening-nasabah-/, diakses pada tanggal 09 Desember 2020.

Ardito Ramdhan, "Catatan ICW, tren penindakan korupsi turun jadi 271 kasus", <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/16532131/catatatan-icw-tren-penindakan-korupsi-turun-jadi-271-kasus>, diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

Ari Saputra, "Indonesia Ranking 89 Indeks Persepsi Korupsi Dunia", <https://news.detik.com/foto-news/d-4405951/indonesia-ranking-89-indeks-persepsi-korupsi-dunia>, diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

Azeza Ibrahim, KPK : Banyak Laporan Korupsi dari Kabupaten Bekasi, <http://dakta.com/news/5124/kpk-banyak-laporan-korupsi-dari-kabupaten-bekasi>, diakses tanggal 16 Mei 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Rekapitulasi Realisasi PAD Pemerintah Jawa Barat (Ribu Rupiah), 2014–2016", <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/28/513/rekapitulasi-realisasi-pad-pemerintah-jawa-barat-ribu-rupiah-2014-2016.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2020.

DP3AKBJabar, Jabar, Provinsi Terbaik di Indonesia's Attractiveness Award 2016, <http://dp3akb.jabarprov.go.id/2016/page/23/>, diakses tanggal 16 Mei 2020.

Fiu, Gubernur Jabar Beri Apresiasi Pemkab Bekasi atas Perolehan Opini WTP Tahun 2018, <https://humas.bekasikab.go.id/berita-754-gubernur-jabar-beri-apresiasi-pemkab-bekasi-atas-perolehan-opini-wtp-tahun-2018.html>, diakses tanggal 16 Mei 2020.

Irvin A, "Perjalanan 10 Tahun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia," <https://www.jokowinomics.id/2020/01/perjalanan-10-tahun-indeks-persepsi-korupsi-indonesia/>, diakses pada tanggal 06 Januari 2021.

Iwan Santosa, "Korupsi, dari kerajaan Nusantara hingga Reformasi", <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi>, diakses pada tanggal 01 April 2020.

Kejaksaan Agung R.I, "Sejarah sebelum Reformasi", https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, Sejarah sebelum Reformasi, diakses pada tanggal 28 April 2020.

Kuswandi, "Pimpinan KPK belum pasang target Naikkan IPK Indonesia pada 2020", <https://www.jawapos.com/nasional/27/01/2020/pimpinan-kpk-belum-pasang-target-naikkan-ipk-indonesia-pada-2020/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

Dewa Brata, "Bangsa ini Belum Mentertawakan Korupsi", *Kompas*, 18 Juli 2005.